

### **BAB III**

## **PROSES DEMOKRATISASI DAN TRANSISI POLITIK DI MYANMAR**

Dalam konteks transisi politik, demokratisasi mendorong transparansi domestik yang dapat bermanfaat terhadap peningkatan kepercayaan dan pemahaman regional. Hal ini disebabkan transisi aturan domestik dapat membawa ketersediaan informasi mengenai keamanan nasional negara dan kebijakan ekonomi serta asset-aset yang dimiliki negara, informasi ini kemudian dapat mengurangi kecurigaan antara negara tetangga dan memperluas keamanan regional serta kerjasama ekonomi yang dapat mendorong stabilitas ekonomi dan politik (Amitav, 2003). Demokratisasi juga menghasilkan keterbukaan antar negara yang dapat membantu penyelesaian masalah regional secara bersama dengan mempengaruhi negara otoriter untuk dapat berkompromi mengenai isu kedaulatan yang selama ini dianggap sensitive dan memberikan ijin kepada institusi regional untuk ikut menyelesaikan masalah internal negaranya seperti dalam mempromosikan masalah HAM.

Penegakkan HAM dan pembangunan demokrasi merupakan isu-isu yang telah mendapatkan perhatian umum dari berbagai kalangan. Seperti, ASEAN yang menempatkan demokrasi sebagai tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan aturan hukum, sementara itu bagi pemerintah Indonesia mensukseskan nilai-nilai demokrasi dan HAM merupakan bagian dari agenda konstitusi negara hal ini kemudian yang mendorong pemerintah Indonesia untuk memainkan peran strategis sebagai pengawas keberlangsungan demokrasi terutama di wilayah Kawasan. Dalam mendukung langkah-langkah demokratis Myanmar, Indonesia selaku negara yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan demokratisasi secara terus menerus mendorong Myanmar untuk

mereformasi sistem otoriter negaranya dan berubah menjadi negara yang demokratis

Pada bab ini akan dibahas mengenai perjalanan proses serta upaya demokratisasi yang dilakukan Myanmar dari masa ke masa dan Isu domestik utama yang dihadapi selama proses transisi politik berlangsung.

#### **A. Proses Demokratisasi di Myanmar dari masa ke masa**

Didirikan sebagai negara dengan sistem demokrasi yang berfungsi setelah meraih kemerdekaanya dari Inggris pada tahun 1948, Myanmar dapat dikatakan hanya menjalani pemerintahan konstitusional yang cukup singkat yaitu selama 18 bulan yang tepatnya berakhir pada tahun 1950an dan setelah itu menyaksikan kudeta militer besar-besaran yang dilakukan pada tahun 1962 (Holliday, 2008). selama hampir setengah abad sejak saat itu, Myanmar belum berhasil dalam merestorasi demokrasi, kendati telah dilakukan berbagai upaya seperti protes berskala nasional yang dilaksanakan pada tahun 1988, pemilihan umum pada tahun 1990, dan demonstrasi saffron yang dipimpin oleh para pendeta di tahun 2007. pada dasarnya pembicaraan mengenai demokrasi di Myanmar didominasi oleh debat politik seputar junta militer yang telah membuat rencana selama pemilihan umum, seperti yang terjadi pada tahun 2010, dan pada saat yang bersamaan pula negara ini memiliki sejarah panjang dalam hal konflik nasional. Dalam beberapa bulan setelah kemerdekaan, Burma telah terpecah belah akibat pemberontakan etnis, dan di sisi lain konflik etnis yang terjadi dalam negeri ini dijadikan sebagai justifikasi bagi junta militer untuk mengambil alih kekuasaan negara. Di bawah rezim otoriter, nasionalisme masih menjadi fitur utama dalam kacamata politik Myanmar. Selama 70 dekade kemerdekaan negara, agenda politik di Myanmar masih didominasi oleh masalah demokratisasi dan konflik nasional yang terus berkejolak.

## 1) Demokratisasi pada masa Dekolonisasi

Transisi ke dalam sistem politik demokrasi telah dialami oleh Myanmar pada masa dekolonisasi yang terjadi di akhir tahun 1940an dan mampu bertahan selama satu setengah dekade hingga awal tahun 1960an. Transisi politik yang terjadi pada tahun 1940an tidak terlepas dari upaya Inggris dalam menyebarkan basis populer pemerintahan kolonial, dan nantinya mempersiapkan Myanmar untuk mendirikan pemerintahan sendiri. Di level pemerintah lokal, pemilihan mulai diinstitusikan dalam basis yang terbatas pada tahun 1882 dan diperluas terutama melalui reformasi yang dilakukan pada tahun 1921. Sementara itu di level pemerintahan nasional. Prinsip-prinsip mengenai pemilihan mulai diperkenalkan pada tahun 1909, ketika dewan perdagangan Rangoon diizinkan untuk memilih salah satu individu untuk menjadi bagian dari 15 anggota dewan legislative. Pada tahun 1923, dewan legislative diperluas menjadi 103 anggota, dimana 79 anggota dipilih melalui *household suffrage* yang telah berusia 18 tahun tanpa adanya diskriminasi gender. Pada tahun 1937 Myanmar kemudian berpisah dari India dan menjadi koloni Inggris yang berdiri bebas. Dan pada tahun 1940an sebuah penilaian dilakukan oleh J.S. Furnivall mengemukakan bahwa : *“The Council had no root among the people ...; in reality it represented only the western superstructure divorced from national life”* kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah kolonial Inggris ini kemudian menciptakan masyarakat plural dimana yang digambarkan sebagai *“medley of peoples... mix but do not combine”*. Dimana menurut Furnivall empat

kelompok utama ras di Myanmar yang terdiri dari European, Chinese, Indian dan Masyarakat asli hanya disatukan oleh kegiatan ekonomi dan tidak memiliki ikatan kultur . Sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat itu yang terbentuk bukanlah nasionalisme Myanmar yang bersifat inklusif melainkan pembagian etnis (Furnivall, 1948).

Pemilu pertama untuk membentuk badan legislatif negara yang berdaulat dilaksanakan pada tahun 1947, dan hasil pemilu pertama ini dimenangkan oleh *Anti-Facist People's Freedom League* (AFPFL). yang dipimpin oleh pahlawan peran Jenderal Aung San, AFPFL merupakan partai populer terdepan yang dibangun atas aliansi etnik pada tahun 1945 yang memiliki tujuan awal untuk mengusir Jepang dari Myanmar. Dengan perjanjian yang dibuat antara aliansi etnis ini Aung San kemudian mendapatkan legitimasi untuk memimpin negara. Namun setelah kematian Aung San pada April 1948, sebuah pemberontakan komunis kemudian terjadi dan diikuti oleh pecahnya konflik etnis oleh Kelompok Karen dan kelompok etnis lainnya. (Furnivall, *Communism and Nationalism in Burma*, 1949)

Pembagian etnis yang terjadi di Myanmar pada akhir tahun 1940an merupakan produk yang dihasilkan oleh praktek kolonialisme Inggris yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung di beberapa wilayah. Sementara itu di belahan wilayah yang berbeda hidup berbagi kelompok etnis yang secara umum membentuk satu pertiga dari total populasi penduduk. Bahkan reformasi konstitusi yang diperkenalkan oleh Inggris untuk mempersiapkan Myanmar membentuk pemerintahan sendiri secara umum telah menyebabkan pemisahan etnis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Furnivall

*“Myanmar was fitted up with the machinery of responsible government on the fashionable model of western democracy...this, however was restricted to Myanmar proper, excluding Shan, Karenni and Tribal hills”* (Furnivall, *Colonial Policy and Practice: A Comparative Study of Burma and Netherlands India*, 1948, p. 159). demokratisasi parsial dari kolonial Myanmar memberikan efek diskriminasi terhadap kelompok etnis di negara tersebut. Sebab sistem demokrasi barat yang dipaksa untuk diadopsi oleh Myanmar tidak memberikan pengakuan politis terhadap berbagai kelompok etnis utama yang membentuk hampir setengah dari jumlah penduduk negara. Dimana hal ini kemudian sangat berpengaruh terhadap timbulnya konflik antar kelompok etnis dan pemerintah.

Selama proses demokratisasi pertama yang dialami oleh Myanmar, situasi politik nasional diwarnai oleh konflik internal, taktik pembagian dan pemerintahan lokal, dan persuasi elit yang mendorong munculnya tentara nasionalis Myanmar yang biasa disebut juga sebagai *Tatmadaw* yang pada saat itu berperan untuk menjaga keamanan nasional, seiring berjalannya waktu pihak militer kemudian memutuskan untuk memiliterisasi politik Myanmar, dimana pada gilirannya hal ini akan membawa kepada upaya demokratisasi kedua Myanmar pada tahun 1980an

## **2) Demokratisasi pada masa kekuasaan junta militer**

Pada masa kemerdekaan, salah satu faktor kegagalan transisi politik negara ini ditandai dengan ketidak berhasilan Myanmar dalam menangani permasalahan sensitif seperti menciptakan otonomi dan representasi yang adil untuk beberapa kelompok

etnis minoritas seperti kelompok etnis Karen. Kelalaian ini didorong oleh intervensi asing terhadap urusan politik domestik, menempatkan Myanmar pada posisi yang rawan akan perang sipil antara pemerintah pusat dengan etnik minoritas yang berada di wilayah pegunungan. Sampai pada akhirnya keadaan yang chaos mendorong Junta militer mengambil alih kekuasaan pada 1962 di bawah pimpinan Jenderal Ne Win. Sejak saat itu Ne Win kemudian segera membentuk dewan revolusioner dan pada gilirannya mendirikan sebuah partai negara yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) . Ne Win lalu mengganti pegawai pemerintahan sipil dengan rekan militernya yang setia dan memiliki pengalaman yang sedikit atau pengetahuan yang minim mengenai administrasi publik. Di bawah kepemimpinan sosialis isolasionisnya yang gagal, Myanmar menghadapi kemunduran ekonomi dan mengalami peningkatan *xenophobia* dan permusuhan yang terjadi antara etnis terus berlanjut. (Singapore Armed Forces, 2008)

Ketika Ne Win akhirnya memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada tahun 1988. pada saat terjadinya masa vakum kekuasaan tersebut, para penduduk Myanmar kemudian mengambil kesempatan tersebut untuk turun ke jalan dan melakukan demonstrasi menuntut diberlakukannya sistem demokrasi dan reformasi politik, hal ini kemudian menandai upaya kedua demokratisasi di Myanmar, mengikuti demonstrasi pada bulan yang sama, penduduk Myanmar kemudian menggelar *Four Eight Uprising* yang dilakukan pada tanggal delapan bulan Agustus tahun 1988 (8-8-88) (Holliday, 2008). Namun sayangnya upaya pro-demokrasi ini tidak berlangsung lama terutama ketika pasukan militer melakukan *crackdown* terhadap masa yang menuntut

perubahan sistem politik tersebut. Pada tahun yang sama pula *Tatmadaw* membubarkan BSPP dan mendirikan The State Law and Order Restoration Council (SLORC) yang dikepalai oleh Kepala Staff Jenderal Saw Maung (Steinberg, 1993). Dalam beberapa hari, Jenderal Saw Maung kemudian mengumumkan kepada publik bahwa rezim militer akan menyelenggarakan pemilihan umum, namun ketika pemilu akhirnya dilaksanakan pada tahun 1990 dan dimenangkan oleh partai oposisi pemerintah yaitu National League for Democracy (NLD), namun hasil dari pemilu tersebut tidak diakui oleh rezim militer sehingga tidak ada transfer kekuasaan yang terjadi pada saat itu. Di sisi lain meskipun upaya kedua demokratisasi gagal menciptakan sistem demokrasi bagi Myanmar namun upaya ini secara substansial membangun *civil soceity*, mendorong mobilisasi massa di pusat-pusat kota seluruh negeri dan formasi lebih dari 200 partai politik. Meskipun dengan hadirnya peran pemimpin karismatik Aung San Suu Kyi yang mengikuti jejak ayahnya dalam mewujudkan kesatuan nasioanal, hal ini tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan dimana persaingan yang kuat antara etnis di Myanmar masih terus menentukan lanskap politik dalam negeri. (Smith, 1999)

Kegagalan gerakan demokrasi Myanmar pada tahun 1988 dan penolakan terhadap hasil pemilu pada 1990 tidak semata-mata langsung menghilangkan demokratisasi dari agenda politik Myanmar, hal ini terlihat dari upaya lainnya yang muncul pada tahun 2003 ketika kepala bidang intelejen junta militer dan perdana Menteri Jenderal Khin Nyunt mengumumkan tujuh poin *road map* menuju demokrasi. Dimana salah satunya dengan merancang piagam baru

pemilihan demokratis dan referendum. Pada basis ini *National Convention* dibentuk kembali pada tahun 2004. Kendati pada tahun yang sama Khin Nyunt diturunkan jabatannya dari junta militer atau yang sekarang dikenal sebagai State Peace and Development Council (SPDC) serta ditempatkan sebagai tahanan rumah, namun *road map* yang disusunnya tetap berjalan sesuai prosesnya (Holliday, 2008). Sementara itu penindasan yang dilakukan oleh negara terhadap pemberontakan Saffron di tahun 2007 mengindikasikan bahwa Junta militer masih akan terus memegang kendali atas proses demokratisasi Myanmar. Selanjutnya, referendum konstitusi diselenggarakan pada Mei 2008, segera setelah kehancuran yang disebabkan oleh topan Nargis, dukungan terhadap dilakukannya referendum meningkat hingga 98%, hal ini tentunya membuka jalan bagi SPDC untuk mengumumkan "*peaceful, modern, developed and discipline-flourishing democratic nation*" akan dilaksanakan pada 2010. upaya yang dilakukan untuk menerapkan langkah-langkah demokratisasi negara mulai terlihat pada tahun 2011, pada saat itu administrasi negara dikatakan menjadi bersifat lebih "sipil" di mata beberapa negara. Pemerintahan sipil dengan masa lalu militer mengikuti dibelakangnya kemudian dilantik pada 30 maret 2011. Presiden Thein Sein terpilih sebagai kepala negara, dan dalam pidatonya ketika dilantik menjadi presiden, Thein Sein mengatakan akan memprioritaskan perbaruan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, menghapuskan kemiskinan, HAM dan mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, dan mengakui adanya penderitaan yang dialami oleh etnis minoritas yang terlibat dalam konflik bersenjata. Namun sayangnya banyak yang



menganggap bahwa ucapan yang dikeluarkan oleh presiden Thein Shein pada saat itu hanya lah berupa kata-kata yang tidak direalisasikan (Tzuhar, 2012)

Lalu enam bulan kemudian, pengamat dari luar dan dalam negeri menyadari bahwa terdapat beberapa langkah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah seperti hal nya, pemberian kebebasan berpendapat dan bertindak kepada peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, pelonggaran restriksi terhadap media, hukum yang mengizinkan pekerja untuk melakukan mogok kerja, amnesti untuk para tahanan politik, dan langkah maju menuju reformasi ekonomi. upaya ini pun masih terus berlanjut, ditandai dengan keikutsertaan kembali National League for Democracy (NLD) ke dalam proses politik Myanmar, persetujuan ASEAN atas tawaran yang diberikan kepada Myanmar untuk mengetuai ASEAN pada tahun 2014, dan kunjungan yang dilakukan oleh mantan Sekretaris negara Amerika Serikat Hilary Clinton.

Bahkan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia telah mendeskripsikan bahwa proses reformasi yang dilakukan oleh Myanmar tidak dapat dirubah kembali. Berbagai pandangan optimis terhadap upaya transisi politik di Myanmar telah menimbulkan harapan baru bagi terwujudnya demokrasi yang baik di Myanmar. Namun, sementara itu, berbagai kritik juga muncul pada tahun 2011 ketika pada saat itu pemerintah “sipil” yang terpilih di Myanmar dikatakan sepenuhnya datang dari pemilu palsu yang diadakan pada november 2010. kritikan ini pada dasarnya datang dari pandangan skeptis terhadap parlemen Myanmar atau yang dapat juga disebut sebagai *Hluttaw* masih didominasi oleh anggota yang berasal dari rezim militer yang sebelumnya. Bahkan

terpilihnya Thein Sein sebagai Presiden Myanmar juga mengejutkan bagi banyak pihak, sebab Thein Sein dulunya merupakan mantan Jenderal dan Perdana Menteri di bawah pemerintahan State Peace and Development Council (SPDC). penunjukannya sebagai Presiden menambah skeptisisme banyak pihak terhadap langkah yang diperlukan untuk melakukan reformasi dari administrasi pemerintah yang baru terpilih. Dapat dikatakan bahwa upaya demokratisasi yang dilakukan pada tahun 2011 tersebut belum menuai hasil yang baik, namun di sisi lain upaya demokratisasi tersebut memberikan celah bagi terbukanya jalan untuk keberlangsungan demokrasi di Myanmar.

### **3) Kebangkitan Demokrasi pasca pembebasan Aung San Suu Kyi**

Salah satu peristiwa yang menandai kebangkitan proses demokrasi Myanmar ialah pada saat pembebasan Aung San Suu Kyi pada tahun 2010, seperti yang diketahui Suu Kyi merupakan tokoh pro-demokrasi yang memainkan peran penting dalam meruntuhkan rezim otoriter Myanmar. Ia dikenal sebagai putri dari pahlawan kemerdekaan Myanmar, Jenderal Aung San. Menyaksikan perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Myanmar pada gerakan 8:8:88 dan jumlah korban jiwa yang berjatuhan pada saat itu menginspirasi Suu Kyi untuk ikut berjuang dalam mewujudkan demokrasi di Myanmar (Burma Campaign UK, n.d.). selama proses perjuangannya berlangsung, Suu Kyi telah ditahan dan menjadi tahanan rumah sebanyak tiga kali, Mulai dari tahun 1990-1995, kemudian kembali ditahan pada tahun 2000-2001, lalu ditahan kembali sebagai tahanan rumah pada 2003, dan kemudian akhirnya dibebaskan

pada tahun 2010. Pada tahun 2012. partai yang dipimpinya yaitu NLD mengikuti pemilu anggota parlemen. Pada saat itu partai Suu Kyi berhasil mengambil 43 kursi dari total 45 jumlah kursi di parlemen hasil baik dari pemilu ini menandai proses keterbukaan Myanmar dengan sistem demokrasi.

Namun di samping peran krusial yang dimainkannya dalam demokratisasi Myanmar (Puspita, 2013). Suu Kyi gagal dalam menangani kasus pelanggaran HAM dalam negeri Myanmar. Pada tahun 2008 tercatat 142 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 66.000 jiwa harus tinggal di kamp pengungsian. Diperkirakan sebanyak 3.700 desa telah dipindah paksa pada kurun waktu 1996-2012. pemindahan paksa terjadi akibat konflik antara etnis minoritas dengan pemerintah dalam hal ini melibatkan pihak militer. Dilaporkan bahwa wilayah yang mengalami eskalasi konflik antara lain negara bagian Karen, Rakhine, Mon dan Pegu. konflik terus terjadi sepanjang tahun 2012 yang menyebabkan 140.000 penduduk muslim Rohingya yang berada di wilayah negara Rakhine menjadi pengungsi. Konflik ini terutama dipicu oleh permusuhan antara Islam dan Buddha yang diketahui telah menjadi problematika klasik yang turut melibatkan faktor ekonomi dan politik di dalamnya (International Crisis Group, 2013). Hingga pada pemilu tahun 2015 ketika NLD kembali memenangkan sebagian besar jumlah kursi parlemen sebanyak 369 kursi dan mengantar Suu Kyi menjadi Kounselor negara. Myanmar masih terus menghadapi permasalahan terkait diskriminasi terhadap HAM . Berbagai pelanggaran HAM yang terus menimpa etnis minoritas Myanmar tentunya menjadi hambatan bagi Myanmar untuk dapat mensukseskan demokratisasi. Terlebih lagi karena hal tersebut menandakan bahwa

pemerintah belum mampu untuk melindungi HAM yang menjadi indikator penting dalam penerapan sistem demokrasi. Hal ini juga yang mengakibatkan proses transisi politik di Myanmar terus menjadi sorotan publik dunia terutama didukung oleh kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Myanmar belum secara menyeluruh mengakomodasikan kepentingan sipil seluruh rakyat terutama etnis minoritas dalam negeri.

#### **4) Isu-isu Domestik Utama Dalam Proses Dempokratisasi Myanmar**

Terdapat berbagai tantangan internal dalam negeri Myanmar yang terjadi selama proses demokratisasi berlangsung. Tantangan-tantangan tersebut meliputi, tekanan politik, kompetisi antara etnis dan penyebaran kemiskinan. Iklim politik dalam negeri Myanmar masih tetap menjadi isu sentral dimana militer masih mendominasi konstelasi politik negeri dengan di tenagh-tengah ketegangan yang terjadi, meskipun telah dilakukan beberapa gerakan damai yang diluncurkan beberapa tahun terakhir ini antara militer dan partai politik. Upaya untuk merumuskan draft konstitusi pada tahun 1996 sendiri mengalami kemunduran, terutama ketika partai politik seperti *National League for Democracy* (NLD) menolak untuk bekerja sama dengan pihak pemerintah saat itu, hal ini tentunya disebabkan oleh pandangan NLD yang melihat bahwa proses politik yang terjadi tidak lah adil dan sangat didominasi oleh junta militer. (International Constitutional Law Organization, 2004)

Pada tahun 1997 meskipun junta militer telah berganti nama menjadi State Peace and Development Council (SPDC) namun kebijakan dan metode operasinya masih saja tidak berubah. Pada pemilihan

umum tahun 1990, NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, memenangkan hampir 80% jumlah suara, namun walaupun begitu, pemerintah menolak untuk menerima hasil dari pemilu tersebut dan memutuskan untuk menahan Aung San Suu Kyi selama 12 tahun. Hal tersebut tentunya mengundang simpati dari komunitas internasional yang secara berulang kali memanggil berbagai pihak yang berseteru dalam hal ini SPDC dan partai-partai politik di Myanmar untuk berdamai. Dapat dikatakan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Myanmar ialah menumbuhkan rasa saling percaya dan menghormati antara seluruh partai, meliputi partai-partai yang berasal dari etnis minoritas.

Iklm politik yang represif tentunya telah menjadi perhatian utama dari negara-negara barat begitu juga dengan negara-negara ASEAN. Dalam hal ini ASEAN sendiri telah menerima tekanan yang datang dari Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengambil langkah tegas terhadap Myanmar. Sebagai hasilnya, bagi ASEAN hingga saat ini meyakinkan Myanmar untuk meliberalisasi iklim politik negaranya menjadi agenda dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu Myanmar secara sosial sangat lah kompleks, Myanmar setidaknya terdiri dari 8 kelompok etnis utama yang masing-masing memiliki keunikan atas warisan kebudayaan, bahasa dan agama. Dan penganut agama terbesar di Myanmar ialah *Theravada Buddhist*, dengan mayoritas populasi penduduk Burma dan rezim militer memiliki kesamaan keyakinan, etnis minoritas seperti Kachin, Shan, Karen menganut agama yang berbeda seperti Kristen dan kepercayaan suku, serta penganut agama islam seperti etnis Rohingya. Dengan berbagai keragaman agama dan latar belakang etnis dari

populasi penduduk di Myanmar tentunya menambah kompleksitas dinamika situasi sosial dalam negeri. Secara lebih lanjutnya lagi, kompetisi antara etnis yang telah di mulai sejak sistem monarki Myanmar hingga saat ini masih belum dapat terselesaikan, oleh sebab itu kompetisi ini menciptakan fragmentasi sosial yang menyebabkan penduduk di Myanmar lebih memiliki rasa kepemilikan terhadap identitas etnis dibandingkan dengan identitas nasional (U, 2006). Berbicara mengenai keyakinan sangat penting untuk diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat Myanmar memiliki kepercayaan terhadap pandangan kultural *Karma* dan *Anade* . Berasal dari doktrin spiritual Budha, penduduk asli Myanmar masih sangat meyakini bahwa kejadian atau peristiwa yang dirasakan pada masa sekarang merupakan cerminan akibat dari tindakan yang dilakukan di kehidupan yang sebelumnya. Mereka meyakini adanya kehidupan setelah kematian dan takdir mereka di kehidupan selanjutnya ditentukan oleh bagaimana cara mereka menjalani kehidupannya saat sekarang. Kepercayaan terhadap *Karma* masih sangat kuat melekat diantara penduduk Myanmar dan memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi dan kondisi individu dan negara. Kepercayaan terhadap *Karma* juga menjadi alasan utama mengapa pendeta Budha di Myanmar memainkan peranan yang sangat penting dalam masyarakat, dan memiliki kekuasaan yang kuat terhadap kekuatan moral yang dapat menyaingi *Tatmadaw* .

Sementara itu *Anade* merupakan sikap kompleks yang mencari harmoni dan menghindari konfrontasi langsung atau ketidaksepahaman. *Anade* juga dapat diartikan sebagai tindakan “*save face*” atau untuk melindungi reputasi seseorang dari situasi yang

memalukan dan menolak tawaran bantuan dalam rangka menghindari hutang kebaikan terhadap orang lain. Di atas hal ini keyakinan agama, penduduk Myanmar, terutama Jenderal militer meyakini hal-hal yang bersifat takhayul seperti itu. Keputusan yang dibuat berdasarkan keyakinan terhadap takhayul masih terlihat dalam sejarah dan kebijakan.

Selain kepercayaan yang tidak biasa dan kompetisi antara etnis, terdapat masalah sosial lain dalam negara Myanmar. Dimana pemerintah berupaya untuk mengindoktrinasi ideologi sosialis kepada rakyat dalam rangka menciptakan identitas nasional. Akibatnya, sejak diimplementasikannya ide ini di sekolah publik, standard pendidikan Myanmar jatuh secara dramatis. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Owen bahwa pendidikan di Universitas bukan lagi menjadi tolak ukur atau kualifikasi yang penting untuk meraih kesuksesan di Myanmar. Upaya untuk mengontrol pemikiran liberal dan ide-ide demokrasi di wilayah universitas telah menyebabkan terkurasnya pemikiran terhadap ide-ide tersebut secara besar-besaran sejak demonstrasi pro-demokrasi pada tahun 1988 (Owen, 2005). Di samping itu meingkatnya kejahatan terorganisasi terutama di area perdagangan manusia dan narkoba juga menjadi masalah sosial utama di Myanmar.

Dari berbagai masalah sosial yang kompleks ini kemudian memunculkan sebuah masalah utama yang dihadapi oleh berbagai upaya diplomatik yang dilakukan oleh komunitas internasional seperti ASEAN maupun negara-negara anggotanya. Dalam hal ini untuk dapat mensukseskan upaya diplomatik yang berusaha untuk diterapkan kepada Myanmar maka komunitas internasional dan negara-negara lain yang turut terlibat di dalamnya harus mampu untuk

bukan hanya mempertimbangkan kepentingan pihak junta militer, melainkan juga harus mampu memahami filosofi masyarakat Myanmar dan pendekatan yang mampu mengatasi perbedaan kepercayaan yang ada di tengah-tengah komunitas sosial di negara tersebut. Kurangnya perhatian terhadap area permasalahan sosial dalam negeri Myanmar ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan luar negeri terhadap Myanmar terutama dalam mengatasi isu demokrasi dan HAM tidak dapat berjalan secara efektif.

Masalah domestik yang terjadi di Myanmar tentunya berkontribusi terhadap ketegangan situasi politik domestik hingga saat ini. Kelompok minoritas bersenjata, seperti Karen People's Army, masih terus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan politik melalui penggunaan kekuatan bersenjata dalam melawan pemerintah. Sebagai bagian dari upaya counterinsurgency, pemerintah Myanmar telah mengadopsi kebijakan yang bersifat represif dan secara paksa mendeportasi etnis minoritas tersebut. Pelanggaran HAM seperti perekrutan tentara anak-anak, pemerkosaan, dan pembunuhan etnis minoritas telah menyebabkan sekitar 700.000 pengungsi dari suku Karen ke Thailand, hal ini tentunya juga mengundang terjadinya konflik atas perbatasan antara dua negara bertetangga tersebut yaitu Myanmar dan Thailand. Sementara itu salah satu pelanggaran kemanusiaan terbesar yang melibatkan pihak militer bersenjata, pemerintah, pendeta budha dan kelompok bersenjata dari etnis minoritas Rohingya juga telah menyebabkan lebih dari 700.000 penduduk Rohingya mengungsi ke wilayah Bangladesh. Permasalahan HAM ini kemudian menjadi salah satu permasalahan yang paling kompleks dan menarik banyak perhatian dari masyarakat global dan komunitas internasional



yang turut menekan pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik kemanusiaan yang disebut oleh PBB sebagai bencana kemanusiaan terbesar (Singapore Armed Forces, 2008). Oleh sebab itu dalam melaksanakan transisi politik ke dalam sistem demokrasi, pemerintah Myanmar harus dapat menangani isu pelanggaran HAM dengan baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan demokratis yang adil, inklusif dan menjamin HAM setiap entitas masyarakat.